



Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)

Sarah Suenita Molle¹, Henny A. Manafe², M.E. Perseveranda³

¹ Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: sarahsuenitaa@gmail.com

² Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: hennyunwira@gmail.com

³ Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: perseverandaerse@gmail.com

Corresponding Author: Sarah Suenita Molle

Abstract: *Previous research and relevant research are very useful for a research or literature review of a scientific work both examining the influence between variables and other factors that also influence a variable itself. This article discusses a literature review of factors that influence accountability in managing regional finances, namely the regional financial accounting system, financial reporting accountability, and internal control. This research intends to determine the hypothesis that has an impact on each variable so that it can be used for further research. The results obtained include: 1) The regional financial accounting system has a positive or crucial influence on accountability in managing regional finances; 2) The accessibility of financial reports has a positive or crucial influence on accountability in managing regional finances; 3) Internal control has a positive and crucial impact on accountability in managing regional finances; 4) The regional financial accounting system, accessibility of financial reports, and internal control simultaneously have a positive and crucial influence on accountability in managing regional finances.*

Keyword: *Regional Financial Management Accountability, Regional Financial Accounting System, Accessibility of Financial Reports, Internal Control.*

Abstrak: Penelitian terdahulu maupun Penelitian yang relevan sangat berguna terhadap suatu penelitian maupun kajian pustak suatu karya ilmiah baik mengkaji tentang pengaruh antar variabel maupun Faktor lain yang turut mempengaruhi suatu variabel itu sendiri. Artikel ini Membahas tentang suatu kajian pustaka faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah, yakni sistem akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan, dan pengendalian internal. Riset ini bermaksud untuk menentukan hipotesis yang berdampak pada masing-masing variabel supaya bisa dimanfaatkan bagi riset selanjutnya. Hasil yang didapat meliputi: 1) Sistem akuntansi

keuangan daerah mempengaruhi positif maupun krusial bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah; 2) Aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi positif maupun krusial bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah; 3) Pengendalian internal berdampak positif maupun krusial bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah; 4) Sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, serta pengendalian internal mempengaruhi positif maupun krusial secara bersamaan bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal

PENDAHULUAN

Upaya menerapkan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah bisa melalui penyampaian laporan dan pemanfaatan keuangan pemerintah daerah tanpa lebih dari jadwal yang ditentukan, serta pemanfaatan anggaran terlaksana secara efektif maupun efisien. Selama mengatur keuangan daerah, maka memerlukan standar akuntansi berdasar pada peraturan dan bisa diterima oleh khalayak umum. Laporan keuangan atas pelaksanaan pemerintah perlu ditunjang oleh bukti administrasi yang bisa masyarakat terima terkait transparansi laporan (Fauziyah, 2017).

Memaksimalkan sistem akuntansi keuangan daerah bisa terlaksana melalui pemberian informasi dan penyampaian capaian keuangan pemerintah. Keharusan sistem akuntansi keuangan daerah, yaitu perbaikan terhadap sistem pencatatan dan laporan untuk menerapkan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah yang baik (Purba & Amrul, 2017). Bahwa aksesibilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah. Aksesibilitas yang terlaksana efektif ditentukan oleh akses publik kepada laporan tanggung jawab atau laporan pertemuan yang bisa dimengerti. Aksesibilitas laporan keuangan ialah kemudahan bagi para penggunanya agar bisa mencermati laporan keuangan pemerintah daerah. Sudah sepatutnya pemerintah daerah bisa mempermudah akses untuk pengguna laporan keuangan, bukan sekadar ke lembaga legislatif maupun lembaga pengawas, melainkan ke masyarakat yang memercayai dana mereka dikelola oleh pemerintah (Kurniawan & Rahayu, 2019).

Untuk mencegah tindakan penyelewengan selama menggunakan laporan keuangan, pemerintah memberi syarat berupa pengendalian internal untuk seluruh lingkungan pemerintahan, termasuk pemerintah pusat atau daerah. Dengan begitu, pemerintah menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2008 perihal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inti sari peraturan tersebut, yaitu penciptaan sistem pengendalian internal pemerintah agar mampu menerapkan pemerintahan yang baik. Pengendalian internal bertugas sebagai pengevaluasi atas analisis selisih/varian antara penghasilan dan belanja daerah sebagai wujud pencegahan tindakan penyalahgunakan di masa depan. Melalui sistem pengendalian yang terlaksana secara optimal, setidaknya pemerintah bisa memaksimalkan kinerja mereka dan merancang laporan keuangan secara terpercaya (Mahmudi, 2016). Peraturan itu pun pada dasarnya sekadar menerapkan model Government Accounting Organization (GAO) yang beracuan ke Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission (COSO) dengan bermacam elemen yang terlaksana secara keseluruhan melalui aktivitas pemerintah, yakni lingkungan untuk mengendalikan, menilai risiko, aktivitas mengendalikan informasi maupun komunikasi, serta memantau pengendalian internal.

Tingkat kesuksesan sistem pengendalian internal bisa terukur dari pengelolaan pemerintahan yang baik. Pernyataan ini terjelaskan melalui laporan kinerja pemerintah yang tertuang pada laporan pemerintah yang terpercaya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) bisa memeriksa laporan itu, kemudian akan mengeluarkan opini audit oleh BPK. Pelaporan keuangan pemerintah patut sesuai ketentuan laporan keuangan yang bermutu, ditentukan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yakni kesesuaian, kredibilitas, bisa dibandingkan, dan bisa dimengerti. Pemenuhan atas kriteria itu sebagai pertanggungjawaban bila pemerintah sudah mengatur dana publik berdasar undang-undang dan kebijakan yang direncanakan (Mahmudi, 2016).

Melalui teori ini, manajemen diasumsikan selaku pihak yang bisa bertindak secara maksimal terkait aksesibilitas demi mempermudah pemangku kepentingan selama menggunakan informasi dengan maksud memenuhi kebutuhannya.

Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, rumusan permasalahan dalam riset ini guna menentukan hipotesis, seperti:

1. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah memengaruhi positif maupun krusial bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan memengaruhi positif maupun krusial bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah?
3. Apakah pengendalian internal memengaruhi positif maupun krusial bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah?
4. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal memengaruhi positif maupun krusial secara bersamaan bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah?

METODE

Prosedur menuliskan artikel ini ialah mempergunakan prosedur kualitatif dan kajian pustaka. Menganalisis teori dan keterkaitan antarvariabel melalui buku maupun jurnal secara luring di perpustakaan maupun daring yang diperoleh melalui Mendeley, Scholar Google maupun media daring lain. Pada kajian kualitatif, maka kajian pustaka perlu dipergunakan secara konsisten dengan hipotesis metodologis. Dengan kata lain, perlu dipergunakan secara induktif agar tidak mengarahkan pertanyaan yang peneliti ajukan. Dasar penting dalam melangsungkan kajian kualitatif, yakni kajian itu sifatnya eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sitem Akuntansi Keuangan Daerah Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Mahmudi (2016) memperjelas bila sistem akuntansi keuangan daerah sebagai rangkaian tata cara konvensional atau secara komputerisasi dengan mengumpulkan data, mencari, menyimpulkan, hingga melaporkan kedudukan keuangan atau operasi keuangan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah ialah unsur dari akuntansi sehingga akuntansi keuangan daerah pun memiliki tahap untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan di pemerintah daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah terdapat peranan yang penting untuk menyampaikan informasi maupun penyikapan kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah daerah demi menyediakan pencapaian keterbukaan maupun pertanggungjawaban publik. Tuntutan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan mewajibkan pemerintah daerah guna mengevaluasi sistem pencatatan atau penyampaian laporan (Superdi, 2017). Sistem akuntansi pemerintahan daerah sesuai PSAK berbasis akrual Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, yakni rangkaian tata cara seperti pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian maupun meringkas transaksi dan pelaporan keuangan demi

mempertanggungjawabkan penyelenggaraan APBD secara manual ataupun melalui komputersasi.

Selama melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah, ada bermacam parameter sebagai tata cara menjalankannya, seperti *input* atau *output* supaya berperan secara maksimal (Superdi, 2017), yakni: 1) Basis akuntansi merupakan aktivitas dengan mencatat dan melaporkan laporan keuangan; 2) Unsur laporan perwujudan alokasi dana. Menyampaikan aktivitas keuangan pemerintah untuk memperlihatkan kepatuhan sumber maupun pengalokasian dana pemerintah selama kurun waktu tertentu; 3) Menyusun APBD. Semua penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah terkait uang atau barang perlu teralokasikan pada APBD; dan 4) Menyusun laporan keuangan berdasar pada Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019.

Aksesibilitas laporan keuangan daerah bermaksud guna mempermudah pengguna dalam mengakses laporan keuangan. Sudah sepatutnya pemerintah daerah mempermudah akses, termasuk bagi masyarakat yang sudah memberi wewenang ke pemerintah daerah guna mengatur dana publik (Rahma, 2017). Melalui upaya mempermudah akses bagi pengguna laporan keuangan, masyarakat pun bisa mengatur tanggung jawab dalam mempergunakan aset daerah maupun kebijakan daerah. Melalui pengontrolan yang baik, paling tidak pemerintah mampu memaksimalkan pertanggungjawaban tata kelola keuangan daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah berdampak positif dan krusial bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah, sesuai kajian FF Albugis (2020). Kajian milik RB Purba (2018) turut memperjelas bila sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah.

Aksesibilitas Laporan Keuangan dalam Memengaruhi Pertanggungjawaban dalam Mengelola Keuangan Daerah

Wijaya, Anim, dan Sutrisna (2016) menuturkan bila aksesibilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempermudah seseorang mendapat informasi terkait laporan keuangan. Pemanfaatan informasi keuangan yang efektif bergantung ke akses publik laporan keuangan yang bisa mereka baca maupun mereka pahami. Supaya informasi pada laporan keuangan bisa sesuai prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban, pemerintah daerah perlu memaksimalkan aksesibilitas laporan keuangan, bukan sekadar menyampaikan ke DPRD, melainkan menyediakan fasilitas bagi masyarakat supaya bisa mendapat dan memahami laporan keuangan (Fauziyah, 2017).

Pemerintah daerah perlu sesuai dengan ketentuan supaya bisa disebut kredibel pada laporan kinerja berwujud publikasi laporan keuangan. Terlampir ketentuan dari kemudahan dalam mengakses laporan keuangan (Fauziyah dan Handayani, 2017) seperti: 1) Transparansi, yakni laporan keuangan yang pemerintah daerah hasilkan akan terpublikasikan secara transparan atau sesuai prinsip keterbukaan melalui media massa; 2) Kemudahan, yakni pemerintah daerah perlu mempermudah pemangku kepentingan untuk mendapat informasi keuangan; dan 3) *Accessible*, yakni laporan keuangan pemerintah daerah bisa diakses oleh masyarakat dari internet.

Pertanggungjawaban bisa diwujudkan jika masing-masing lembaga mengaplikasikan sistem pengendalian internal secara tepat. Penerapan itu dilaksanakan sebab lembaga harus melaporkan keuangannya secara terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan (Sari et al., 2017). Pengendalian sebenarnya terarahkan ke upaya menghindari dari tindakan yang melawan hukum atau penyimpangan, maka pengendalian internal ini mampu memengaruhi pertanggungjawaban untuk mengelola keuangan daerah.

Kemudahan mengakses laporan keuangan berdampak positif dan krusial bagi pertanggungjawaban untuk mengelola keuangan daerah juga sudah dikaji oleh beberapa

peneliti sebelumnya, seperti P Septa (2018) yang memperjelas bila aksesibilitas laporan keuangan memengaruhi bermakna bagi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. MR Fauziyah, N Handayani (2017) turut memperjelas jika aksesibilitas laporan keuangan secara simultan memengaruhi bermakna bagi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah.

Pengendalian Internal Berdampak pada Pertanggungjawaban dalam Mengelola Keuangan Daerah

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commisions, 2013) mempertegas pengendalian internal merupakan tahap yang terancang maupun terpengaruh oleh direktur, manajemen, dan anggota lain. Selama melaksanakan pemerintahan, pemerintah harus beracuan ke prinsip pertanggungjawaban. Guna menerapkan prinsip itu, pelaksana pemerintahan harus transparan dan hati-hati selama memanfaatkan alokasi dana maupun aset daerah. Kondisi ini terkait dengan kegiatan pengendalian yang akan dijadikan laporan pengevaluasian kegiatan pengendalian, lalu mengomunikasikan peristiwa secara tepat waktu, terpercaya, dan bertanggung jawab (Angraini et al., 2016).

Mahmudi (2016) menuturkan bila ada bermacam model untuk mengembangkan pengendalian internal, seperti (COSO, 1992) lingkungan pengendalian; aktivitas pengendalian; menilai risiko; informasi maupun komunikasi; dan memantau pengendalian internal.

Sistem akuntansi keuangan daerah pun berperan penting untuk menginformasikan maupun mengungkapkan segala kegiatan dan capaian kerja keuangan pemerintah dalam menyediakan sarana pencapaian keterbukaan maupun pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban keuangan mewajibkan pemerintah daerah mengevaluasi sistem pencatatan maupun terkait teknis penyampaian laporan (Suprihastini et al., 2017). Pemerintah daerah harus memaparkan hasil laporan daerah, begitu pun dengan laporan tata kelola keuangan daerah ke pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerintah memerlukan sistem untuk mencatat, pengadministrasian, tata kelola, dan laporan mengenai keuangan daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Berdampak pada Pertanggungjawaban dalam Mengelola Keuangan Daerah

Erlina Rasdianto (2013:6) menuturkan bila sistem akuntansi keuangan daerah sebagai sistem dengan tugas mencatat, menggolongkan, menafisirkan, meringkas transaksi maupun peristiwa keuangan, dan penyampaian laporan demi melaksanakan anggaran belanja daerah Abdul Halim (2008:42) mempertegas jika akuntansi keuangan daerah ialah tahap untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat maupun melaporkan transaksi keuangan dari pemerintah daerah/kabupaten/kota/provinsi sehingga menjadi informasi penting terkait penentuan keputusan keuangan.

Berkembangnya bidang teknologi informasi bukan sekadar dipergunakan oleh organisasi bisnis, tetapi organisasi sektor publik, begitu pun dengan pemerintahan. Sesuai PP No 56 Tahun 2005 terkait Sistem Informasi Keuangan Daerah, menyebut jika menindaklanjuti penyelenggaraan pembangunan sesuai prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, pemerintah harus meningkatkan maupun mempergunakan perkembangan teknologi dan informasi, serta memberikan informasi itu ke pelayanan publik. Pemerintah pun harus memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk pembangunan sistem informasi manajemen dan prosedur yang memberi peluang bagi pemerintah untuk bekerja secara terpadu melalui penyederhanaan akses antarunit kerja.

Mulyana (2006) memperjelas bila kemudahan dalam mengakses laporan keuangan sebagai wujud mempermudah masyarakat untuk mendapati informasi laporan keuangan

pemerintah pusat/daerah. Rohman (2009) memaparkan aksesibilitas pada sudut pandang tata ruang sebagai kondisi atau keterkaitan dari masing-masing tempat atau mempermudah seseorang/sesuatu untuk bergerak dari tiap tempat dengan kecepatan yang wajar. Mardiasmo (2002) menyampaikan bila laporan keuangan pemerintah ialah hak masyarakat yang perlu pemerintah pusat/daerah berikan kepada masyarakat.

Melalui penjelasan tersebut, tidak sekadar menyediakan laporan lain, ada sesuatu yang harus pemerintah daerah lakukan, yaitu mempermudah akses laporan masyarakat untuk pengguna laporan. Supaya informasi pada laporan keuangan bisa tersampaikan sesuai prinsip akuntabilitas, maka harus melaksanakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)

SIKD ialah sistem informasi secara transparan bisa masyarakat akses maupun masyarakat ketahui (UU Nomor 33 Tahun 2004). Budiriyanto (2013) memperjelas soal SIKD secara nasional dibutuhkan untuk menyediakan informasi keuangan daerah ke masyarakat dan sebagai landasan bagi pejabat dalam membuat kebijakan fiskal terkait pembuatan keputusan. Penjelasan ini memberi simpulan jika pemerintah daerah perlu menyediakan akses ke pemangku kepentingan terkait laporan keuangan memanfaatkan media massa daring maupun luring ataupun melalui upaya lain (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Tindakan itu dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah terhadap semua hasil pembangunan.

Pengendalian internal sesuai penuturan Tuanakotta (2014:352), yaitu suatu tahap, kebijakan, dan tata cara atas rancangan manajemen untuk memperjelas laporan keuangan yang terpercaya dan berdasar pada rancangan akuntansi. Pengendalian internal mengulas segala sesuatu, seperti perilaku manajemen terhadap pengendalian, kemampuan pegawai utama, menilai risiko, akuntansi, sistem informasi keuangan yang bisa dimanfaatkan, serta aktivitas dalam pengendalian konvensional. Pengendalian internal bermaksud untuk menyediakan laporan keuangan bebas dari kesalahan dalam penyajian material sehingga faktor penyebab diperoleh melalui kesalahan atau kecurangan.

Sistem pengendalian internal meliputi kebijakan maupun tata cara yang dirancang agar bisa meyakinkan pihak manajemen bila perusahaan mampu memperoleh target. Kebijakan maupun tata cara ini kerap dikenal sebagai pengendalian, lalu secara bersamaan akan mengendalikan internal unsur tersebut. Arens (2014:340) menambahkan bila manajemen mempunyai tiga maksud terkait perancangan sistem pengendalian internal, yakni:

1. Kredibilitas laporan keuangan

Manajemen mempertanggungjawabkan diri dalam menyiapkan laporan untuk pemodal, kreditur, dan pengguna lain. Maksud pengendalian internal yang efektif atas laporan keuangan, yaitu memenuhi pertanggungjawaban atas laporan keuangan tersebut.

2. Efisiensi dan efektivitas operasi.

Pengendalian terhadap perusahaan bisa mendesa pemanfaatan sumber daya seefektif maupun seefisien mungkin demi mengoptimalkan sasaran perusahaan. Maksud dari pengendalian ini, yakni memperoleh informasi keuangan maupun bukan keuangan secara tepat terkait aktivitas perusahaan dalam penentuan keputusan.

3. Patuh terhadap hukum

Peraturan terkait perlindungan lingkungan dan hak sipil berkaitan tidak langsung dengan akuntansi, sedangkan hal lain berhubungan dengan akuntansi meliputi perundang-undangan terkait pajak pendapatan maupun provisi legal antikecurangan.

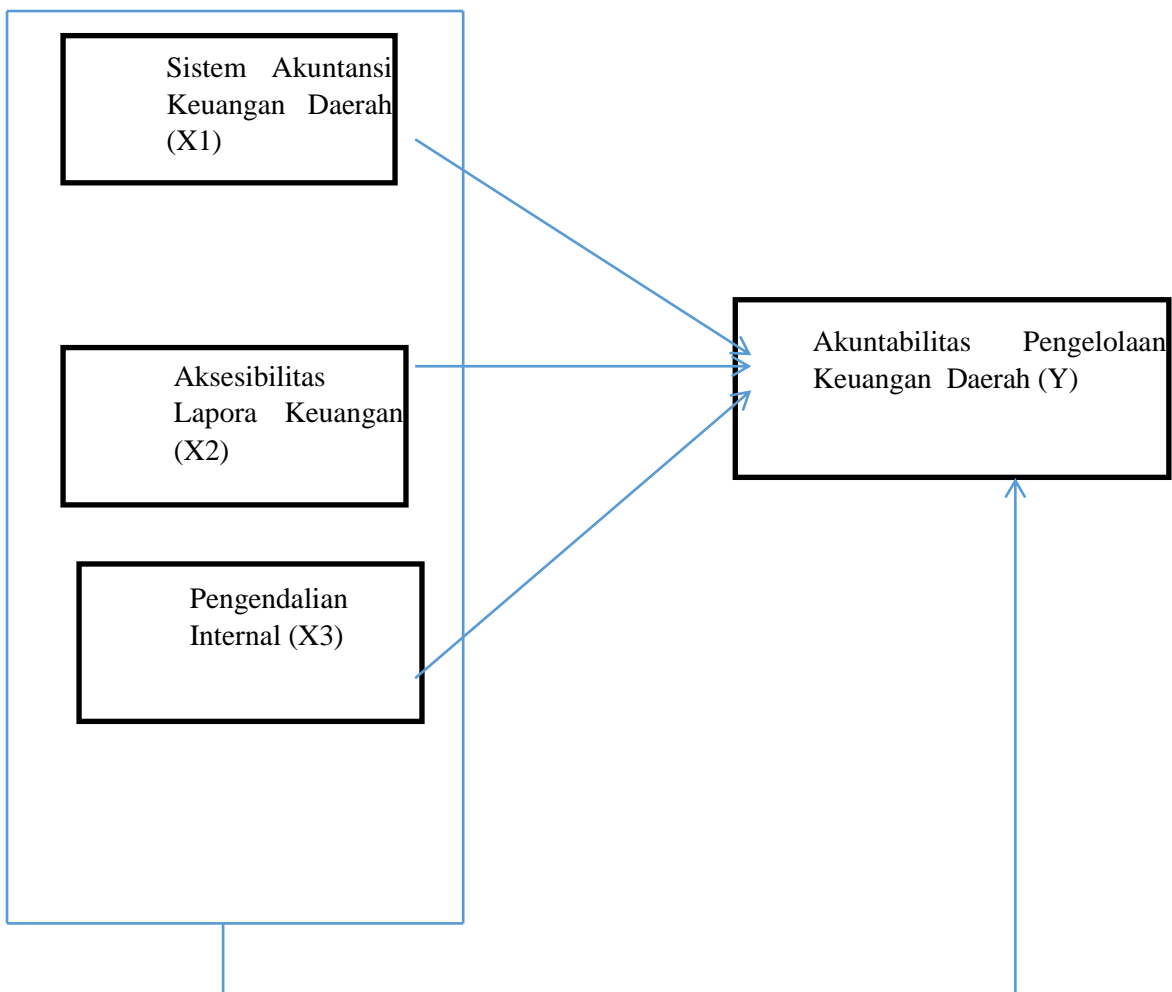
Supriyono (2016:149) menuturkan bila pengendalian internal memberi manfaat bagi organisasi akibat kapabilitasnya dalam mengantisipasi atau paling tidak meminimalkan tindakan penyelewengan, serta bisa menyingkirkan tindakan yang berisiko. Pengendalian internal pun bermanfaat dalam meminimalkan biaya yang tidak diinginkan dan menyingkirkan anggaran dana tersebut. Permasalahan terkait pengendalian internal, yaitu

permasalahan perilaku. Manajer perlu hati-hati selama merancang pengendalian internal supaya berjalan efektif.

Sesuai pemaparan tersebut, memperjelas bila sistem akuntansi keuangan daerah, kemudahan dalam mengakses laporan keuangan, serta pengendalian internal berdampak positif maupun krusial bagi pertanggungjawaban tata kelola keuangan daerah. Sama seperti penjelasan Z Antika, Y Murdayanti, H. Nasution (2020), yang memberikan kesimpulan variabel secara simultan sistem akuntansi keuangan daerah, kemudahan dalam mengakses laporan keuangan maupun pengendalian internal terhadap pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah. Kajian Milik P Septa (2018) memberikan kesimpulan jika variabel secara bersamaan pelaporan keuangan, dan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan memengaruhi bermakna terhadap pertanggungjawaban pelaporan keuangan.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, maka didapat kerangka berpikir seperti:



Berdasar pemaparan di atas, maka sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan maupun pengendalian internal memengaruhi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah secara terpisah maupun bersamaan. Selain variabel sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal yang berdampak pada pertanggungjawaban mengelola keuangan daerah, terdapat variabel yang memengaruhinya, desentralisasi fiksas (X4), kinerja keuangan daerah (X5), kompleksitas (X6)

KESIMPULAN

Sesuai uraian yang sudah dilaksanakan, maka rumusan hipotesisnya ialah:

1. Sistem akuntansi keuangan daerah berdampak positif maupun krusial pada pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah
2. Aksesibilitas laporan keuangan berdampak positif maupun krusial pada pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah.
3. Pengendalian internal berdampak positif maupun krusial pada pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah.
4. Sistem akuntansi keuangan daerah, kemudahan dalam mengakses laporan keuangan, dan pengendalian internal berdampak positif maupun krusial pada akuntabilitas laporan keuangan.

REFERENSI

- Angraini, D., Agusti, R., & Anggraini, L. (2016). PENGARUH SISTEM KEUANGAN TRANSPARANSI, PENGENDALIAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir). *Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1178–1189.
- Fauziyah, M. R. (2017). PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 6, Juni 2017 ISSN, 6(2017), 1689–1699*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Harahap Sofyan. (2015). *TEORI AKUNTANSI (14th edition)*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Kurniawan, D., & Rahayu, S. (2019). *KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018) THE EFFECT OF THE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENT AND ACCESSIBILITY FINANCIAL STATEMENT ON REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY (Case Study in Mataram City Regional Secre.* 6(1), 705–714.
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.* 8(1), 99–111. *Vol.8 No.1 2017 ISSN:2087-4669*.
- Rahma, N. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM Fekon*, 4(2), 4309–4323. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Aliyah dan Nahar. (2012). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara.” *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189. Hlm. 137-150
- Apriliani, dkk. (2015). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung).” *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015)*. Hlm. 1-10
- ande, Peggy. (2013). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat).” *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas

Negeri Padang, Sumatra Utara. Hlm. 1-20

Somad, Abdus. (2016). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang).” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*. ISSN: 2337- 56xx. Volume:xx, Nomor: xx. Hlm. 1-20